
Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Ekosistem Anti Korupsi di Era Society 5.0

Siti Munawaroh¹, Rifa Nailufar², Siti Nabilah³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{1,2,3}Jl. Soekarno-Hatta No.748, Bandung, 40614, Indonesia

**E-mail : me.simun@gmail.com¹, rifanailufar@gmail.com², nabilahs371@gmail.com³*

ABSTRAK

Kasus korupsi di dunia pendidikan menjadi salah satu dari lima kasus besar korupsi di Indonesia. Dalam sebuah rilis dinyatakan bahwa 21,7 persen kasus korupsi di dunia pendidikan berkaitan dengan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun sebuah ekosistem antikorupsi. Ekosistem dimana seluruh elemen sekolah memiliki visi dan misi yang sama dalam memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi literatur ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah di *era society* 5.0 sangat dibutuhkan dalam menciptakan ekosistem antikorupsi di sekolah. Diantara peran kepala sekolah ini adalah peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, pendidik dan evaluator. Peran kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan harus mampu mendukung transparansi pengelolaan lembaga. Kepala sekolah sebagai pendidik harus mampu menjadi pendidik utama dan bekerja sama dengan guru dalam pendidikan antikorupsi di sekolah. Kepala sekolah sebagai evaluator harus mampu membangun ekosistem antikorupsi di lembaga pendidikan ini berkelanjutan. Ketiga peran ini didukung dengan memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai sebuah alat untuk mengelola lembaga pendidikan di *era society* 5.0.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Korupsi, Era Society 5.0*

ABSTRACT

Corruption in education is one of the top five corruption cases in Indonesia. A release stated that 21.7 percent of corruption cases in education are related to BOS funds or school operational assistance. This research aims to reveal the leadership role of school principals in building an anti-corruption ecosystem. The ecosystem where all elements of the school have the same vision and mission in

eradicating corruption. The research method used is a qualitative research method with a literature study method. This literature study shows that the leadership role of school principals in the era of society 5.0 is needed to build an anti-corruption ecosystem at school. Among this school principal roles are the leadership role of school principal as a policy maker, educator and evaluator. School principal as policy maker must be able to support transparency in institutional management. School principal as educator must be able to be the main educator and work together with teachers in anti-corruption education in schools. School principal as evaluator must be able to build this anti-corruption ecosystem in educational institution is sustainable. These three roles are supported by maximizing the use of technology as a tool for managing educational institution in the era of society 5.0.

Keywords: *Leadership, Corruption, Society Era 5.0*

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan sebuah tindakan penyelewengan kekuasaan dan jabatan dalam upaya mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun lembaga. Asian Development Bank (ADB), mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan perilaku tidak pantas serta melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Pelaku juga melakukan pembujukan kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dengan menyalahgunakan jabatan (KPK, 2021). Korupsi menjadi permasalahan bersama yang perlu di lawan dan diberantas agar kehidupan dan cita-cita lembaga dapat tercapai. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas negara Indonesia, oleh sebab itu pemerintah mengatur 20% anggaran negara untuk sektor pendidikan. Namun sayangnya, anggaran besar ini tidak sejalan dengan kualitas pendidikan yang ada hari ini.

Menurut laporan (PECB Beyond Recognition, 2022) kasus korupsi di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2021. Kasus korupsi di dunia pendidikan menjadi salah satu dari lima kasus besar korupsi di Indonesia. Dalam laporan tersebut disebutkan juga bahwa 21,7 persen kasus korupsi di dunia pendidikan berkaitan dengan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Selain itu, (Ramadhan, 2022) menuliskan dalam tulisannya bahwa Wakil Ketua KPK RI mengungkapkan kasus korupsi di sector pendidikan dianggapnya menjadi kasus korupsi yang paling memprihatinkan. Beliau juga menegaskan bahwa kasus korupsi di sector pendidikan terjadi dari hal terkecil seperti kebiasaan menyontek sampai adanya korupsi dalam proses rekrutmen. Berdasarkan data dari Indonesian corruption watch (ICW) sektor pendidikan menduduki peringkat kelima tertinggi kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun sejak tahun 2016-2021, terdata 240 kasus

korupsi di bidang pendidikan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,605 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2021).

ICW dalam rilisnya memaparkan bahwa pelaku korupsi sektor pendidikan terdiri dari berbagai latar belakang yang heterogen dari guru hingga bupati. Sebanyak 57,8% dari total pelaku korupsi di sekolah merupakan kepala sekolah, disusul dengan guru/ pihak lain dan, posisi ketiga adalah bendahara/ staf keuangan. Hal ini menjadi teguran keras sekaligus pertanyaan besar, dimana peran kepemimpinan yang seharusnya mampu menumbuhkan budaya anti korupsi justru bertindak sebaliknya. Budaya korupsi yang menormalisasi korupsi kecil-kecilan yang terlanjur mengakar menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan. Keterikatan antara kepemimpinan dan juga korupsi memiliki hubungan, sebab keduanya merupakan hubungan simbiosis mutualisme, dalam perspektif ini kepemimpinan bisa saja melahirkan atau membiarkan tindakan-tindakan korupsi (Hidayanto, 2005). Jack Bologne mengungkap empat factor yang memicu tindak korupsi, yakni: 1) *greed* (keserakahan), yang berasal dari rasa tidak puas, 2) *Opportunity* (kesempatan) yang disebabkan dari factor kelembagaan, hal ini dapat ditangani bila ada teladan dari pimpinan, 3) *Needs* (kebutuhan) baik itu kebutuhan dasar maupun hal mewah, dan 4) *Expose* (pengungkapan) yakni konsekuensi dari temuan tindak korupsi yang dilakukan pelaku (Nugroho & Fahmi, 2022).

Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengedukasi calon generasi bangsa, malah menjadi tempat yang juga memberi contoh tidak baik untuk generasi bangsa. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam kampanyenya menyatakan bahawa korupsi di bidang pendidikan dimulai dengan kebiasaan kurang baik. Mulai dari menyontek sampai tidak mengikuti aturan. Beliau menegaskan bahwa hal ini terjadi karena minimnya pengajaran akan nilai integritas (Ramadhan, 2022). (KEMENDIKBUD, 2023) menyatakan bahwa korupsi adalah sebuah bentuk penyalahgunaan uang negara, perusahaan, yayasan atau organisasi demi keuntungan perorangan.

Namun disamping maraknya kasus korupsi di bidang pendidikan, pemerintah melalui KPK juga terus berusaha memberantas korupsi hingga ke akarnya. KPK melalui strategi trisula, yakni pendekatan antikorupsi, perbaikan system melalui pencegahan korupsi serta penindakan. Dalam hal ini, KPK membentuk Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang di dalamnya terdapat Direktorat Jejaring Pendidikan yang berfokus mengembangkan program-program pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang (KPK, 2021). Berbagai upaya telah coba dilakukan, baik secara preventif maupun kuratif. Organisasi sebagai sebuah wadah dimana sekumpulan orang berkumpul dan berusaha mewujudkan satu tuju memiliki pemimpin, yang mengarahkan langkah-langkah pencapaian tujuan tersebut. Maka perspektif kehadiran dan peran pemimpin menjadi kajian yang perlu di teliti lebih jauh lagi.

Pemimpin merupakan orang yang diberi amanah/tanggungjawab kepemimpinan. Sementara kepemimpinan adalah sifat yang sejatinya melekat pada diri seorang pemimpin. Kepemimpinan memiliki makna kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seorang pemimpin dalam mempengaruhi, memberikan motivasi, mengajak, memberikan tuntunan, menggerakkan, memberikan arahan kepada seseorang maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan (Rahim, 2019). Terminologi ini menjelaskan bahwa pemimpin memiliki andil yang besar dalam menentukan arah gerak sebuah organisasi. Pemimpin yang berhasil di definisikan sebagai pemimpin yang mampu membawa tim menuju pencapaian tujuan serta mampu mengambil respon dan tindakan yang tepat dalam berbagai situasi. Selain itu, pemimpin dalam upaya pemberantasan korupsi juga dituntut untuk memiliki ketegasan dalam bersikap, agar terciptanya koridor yang jelas di lembaga (Rahim, 2019). Pemimpin memiliki peranan yang mendasar berkaitan dengan pola kepatuhan anggota organisasi, hal ini disebabkan bukan hanya sebab kekuatan/kekuasaannya untuk mengimplementasikan kepatuhan itu sendiri, namun karena pemimpin menjalankan kepatuhan itu dan menjadi objek refleksi dan etika anggota organisasi (dos Santos et al., 2012). Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok agar tujuan kelompok tersebut dapat tercapai (Sulhan, 2020). Dalam masalah kali ini kepemimpinan kepala sekolah dibutuhkan agar sekolah bisa menjadi garda terdepan lagi dalam membenahi permasalahan yang tengah terjadi. Maka kepala sekolah harus mampu meningkatkan keperdulian warga sekolah terhadap pendidikan anti korupsi. Tujuan kelompok dalam kepemimpinan ini adalah untuk menghapuskan korupsi yang ada di dunia. Lebih spesifiknya kepemimpinan kepala sekolah bertujuan untuk mendidik warga di sekolah terkait pentingnya pendidikan anti korupsi.

Menurut (Zuryati et al., 2015) kepemimpinan kepala sekolah adalah cara seorang pemimpin untuk menggerakkan warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan kepala sekolah menjadi bagian penting dalam mengelola warga sekolah. Sedangkan menurut (Sartika, 2021) kepemimpinan kepala sekolah adalah gerakan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menggerakkan warga sekolah untuk mencapai visi dan tujuan sekolah. (Srimulyani, 2022) juga menekankan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan untuk menggerakkan lingkungan supaya menghasilkan sebuah pencapaian. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran kepemimpinan berpengaruh besar dalam menggerakkan warga sekolah untuk mencapai tujuan.

Harry Mintzberg dalam (Hidayat & Wijaya, 2017) menyebutkan bahwa pemimpin memiliki tiga peran yakni interpersonal, informational dan decisional roles. Interpersonal adalah peran pemimpin sebagai pembangun relasi antar individu. Peran ini termasuk didalamnya figurehead, leadership dan liaison. Figurehead berarti kepala sekolah sebagai

wajah suatu sekolah. Leadership berarti kepala sekolah adalah seseorang yang harus memiliki sikap tanggung jawab dalam mengorganisir sumber daya sekolah. Sedangkan liaison adalah pintu temu antar kebutuhan sekolah dengan organisasi di luar sekolah. Peran informational berarti kepala sekolah adalah penerima serta penyebar informasi bagi seluruh warga sekolah. Lalu peran decisional roles berarti kepala sekolah memiliki hak untuk mengambil keputusan di sekolah. Keputusan yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah.

Ekosistem pendidikan adalah sebuah jaringan yang menghubungkan pengetahuan dan pendidikan di sebuah sistem yang bergerak dan bekerjasama dengan baik. Ekosistem juga diartikan sebagai suatu hubungan yang ada di dalam sebuah komunitas dengan lingkungannya. Konsep ini mencakup manusia dan struktur sosialnya. Konsep ekosistem di dunia pendidikan berarti suatu sistem yang menggambarkan pola atau proses pembelajaran agar mampu beradaptasi, kuat menghadapi segala situasi, tahan banting, sadar akan perbedaan, dan memiliki kemampuan untuk berbagi ilmu tanpa control khusus dari luar. Perkembangan dunia Pendidikan, tidak terlepas pula dari perkembangan yang terjadi di dunia digital. Di era society 5.0 ini kita di tuntut untuk mampu hidup berdampingan dengan teknologi sebagai sebuah alat yang akan mempermudah kita dalam melaksanakan berbagai peran dan mencapai tujuan. Society 5.0 adalah suatu konsep dari Jepang yang mempertimbangkan kemajuan teknologi dalam memudahkan kehidupan (Sabri, 2019). Society 5.0 menekankan pada kemajuan teknologi sebagai langkah untuk memudahkan kehidupan manusia. Era ini memerlukan banyak persiapan baik dari persiapan masyarakat atas munculnya berbagai teknologi baru dan juga keuangan untuk mendukung kemajuan ini (Rokhim et al., 2022). Eksosistem pendidikan terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan serta orang tua dan masyarakat sekitar. Ekosistem pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka meraih tujuan Bersama (Perdana, 2018). Sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa ekosistem pendidikan adalah jaringan yang menghubungkan sebuah Lembaga pendidikan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan bersama. Ekosistem berfokus terhadap manusia sebagai individu di sebuah Lembaga untuk mampu mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan hubungan yang ada di ekosistem pendidikan. Diantara elemen ekosistem pendidikan disini ada kepala sekolah sebagai pemimpin. Oleh karena itu peran kepala sekolah sangat berpengaruh dalam berjalannya tujuan ekosistem ini.

Dalam artikelnya Puput Martha Binati memaparkan bahwa korupsi berawal dari rendahnya nilai moral dan akhlak. Dalam lembaga pendidikan, merujuk pada UU NO 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, sejatinya pendidikan merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat (Binati, 2021). Maka penting bagi pemimpin pendidikan untuk memahami peran-perannya dalam membentuk ekosistem antikorupsi di lembaga pendidikan di era society 5.0. dimana dalam

hal ini pemimpin memiliki andil yang besar di era society 5.0 dalam mewujudkan ekosistem antikorupsi di dalam lembaga, pemimpin juga memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengarahkan anggota organisasi untuk senantiasa memiliki integritas dalam melakukan berbagai upaya pencapaian tujuan, maka riset ini bertujuan untuk merumuskan apa dan bagaimana peran kepemimpinan dalam membangun ekosistem antikorupsi di lembaga pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengizinkan peneliti untuk menuangkan hasil penelitian dalam bentuk kata. (Suyani, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan hasil penelitian berupa deskripsi kata. Hal ini dikuatkan oleh (Ervina, 2021) yang menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang menyajikan data hasil penelitiannya berupa kalimat. Dalam penelitian ini hasil penelitian akan diuraikan secara rinci dalam bentuk deskripsi mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan anti korupsi di sekolah. Lebih dalamnya penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Menurut (Ervina, 2021) (Anwar, 2019) penelitian pustaka atau analisis isi merupakan penelitian dimana peneliti menganalisis dokumen berupa teks, gambar atau simbol yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait peran kepemimpinan kepala sekolah, pendidikan anti korupsi dan era digitalisasi di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menganalisis sumber primer yang berkaitan dengan peran kepemimpinan dan pendidikan anti korupsi di sekolah. Setelah didapatkan data terkait permasalahan tersebut, peneliti mulai menganalisa dan terakhir peneliti menarik kesimpulan. (Nazir, 2003) menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen dan literature terkait pembahasan untuk ditelaah sebagai cara memecahkan masalah. Berdasar pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Peneliti menelaah sumber primer yang telah disebutkan diatas lalu mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literturnya Pope menyatakan bahwa para aktivis korupsi kebingungan darimana harus memulai memberantas korupsi, karena sejarah membuktikan pemimpin yang awalnya bersih bahkan bisa saja berakhir dengan dakwaan korupsi. Hal tersebut bertambah rumit karena ternyata pemimpin bersih yang berhadapan dengan sistem lama

yang korup, nyatanya tidak bisa menghindar dari tindak korupsi (Jeremy Pope, 2008). Namun dalam literatur lainnya menunjukkan bawa efektifitas kepemimpinan dalam suatu organisasi memiliki dampak positif terhadap langkah preventif dari tindak korupsi (Sari et al., 2021). Menurut Suradinata dalam (Pembudi, 2020) kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang pemimpin berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal. Sedang menurut (Srimulyani, 2022) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengaruh lingkungan atau situasi disebuah organisasi untuk menghasilkan pencapaian atas sebuah tujuan. Berdasarkan kedua kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengerakkan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Terutama sebuah kemampuan memimpin sumber daya manusia yang memungkinkan untuk bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengorganisir segala sumber yang ada untuk pencapaian goal yang telah ditentukan.

Korupsi di dunia pendidikan sudah berlangsung terlalu lama (Hallak & Poisson, 2005). Kita harus mampu menyusun strategi untuk mengembangkan transparansi dan pertanggung jawaban dalam pendidikan. Beliau menyatakan bahwa korupsi berhubungan dengan monopoli kekuasaan dan kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Kepustakaan menunjukan bahwa korupsi memiliki hubungan dengan monopoli, kurangnya informasi terhadap public dan kurangnya transparansi yang berkaitan dengan keuangan. (Hallak & Poisson, 2005) juga menyatakan bahwa tindakan koruptor memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Banyak jenis kelakuan yang buruk yang dapat merusak implementasi dari perencanaan pendidikan yang tekah direncanakan terhadap proses pembelajaran. Termasuk didalamnya pendidikan terkait manajemen keuangan, gaji guru bocornya informasi terkait ujian dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan yang salah merupakan bahan tumbuhnya tindak korupsi di dunia pendidikan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk memaparkan peran kepemimpinan kepala sekolah agar hal-hal yang disebut diatas tidak terjadi di sekolahnya. Kajian literatur ini berusaha mengungkap beberapa peran kepemimpinan dalam membangun ekosistem antokorupsi, diantaranya sebagai berikut:

3.1. Kepala Sekolah sebagai Pembuat Kebijakan

Korupsi di dunia pendidikan adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk pencapaian pribadi dan mempengaruhi pendidikan dalam berbagai kebiasaan. Korupsi di dunia pendidikan juga berkaitan dengan pencurian, penggelapan dana pendidikan. Hal yang dapat dilakukan sebagai langkah penanggulangan korupsi di sekolah diantaranya dengan membuat, merencanakan dan mengelola kebijakan sekolah. Kebijakan di definisikan sebagai rangkaian konsep yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan juga menjadi dasar rencana dalam melaksanakan suatu kepemimpinan.

Kebijakan adalah tentang cara bertindak, pernyataan cita-cita dan menjadi garis pedoman untuk mencapai cita-cita tersebut. Menurut (Tilaar & Nugroho, 2009) kebijakan adalah suatu hasil dari musyawarah mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Tindakan disini memiliki tujuan tertentu yang biasanya berhubungan dengan merubah tatanan masyarakat. Dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah aturan atau dasar cara bertindak suatu kelompok atau perorangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam upaya membangun ekosistem antikorupsi di Lembaga Pendidikan kepala sekolah berperan dalam membuat kebijakan yang pro terhadap upaya preventif dari korupsi itu sendiri. Kebijakan harus dimaknai sebagai cara untuk mencapai visi Bersama untuk membangun ekosistem antikorupsi oleh seluruh warga sekolah.

(Rohman, 2009) menjelaskan bahwa istilah kebijakan dalam pendidikan sering dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*). (Rohman, 2009) juga menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan public. Kebijakan pendidikan secara khusus mengatur regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi, serta peraturan perilaku dalam pendidikan. Sedangkan (Arifudin et al., 2016) (Tilaar & Nugroho, 2009) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah seluruh proses dan hasil perumusan langkah pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka memajukan dan mewujudkan tujuan pendidikan. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah sebuah aturan yang mendasari jalannya sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan dijadikan sebagai sebuah aturan atau pedoman di dunia pendidikan untuk mencapai visi dan misi pendidikan.

Korupsi pada dasarnya akan berdampak pada tingkat kepercayaan pengguna, oleh sebab itu kepercayaan juga dibangun oleh sejauh mana Lembaga mampu memberikan informasi secara transparan. (Solihat & Sugiharto, 2009) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu factor yang mempengaruhi partisipasi. Transparansi itu sendiri adalah kegiatan dimana informasi terkait suatu kejadian diberitakan dengan akurat dan tepat waktu. Transparansi ini juga bisa dilihat dari aspek kebijakan anggaran, laporan pertanggungjawaban dan adanya sistem penginformasian kepada public. (Sholeh, 2023) menyatakan bahwa untuk membangun citra positif Lembaga, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting bagi Lembaga tersebut. Transparansi itu sendiri mencakup keterbukaan atau ketersediaan informasi yang jelas tentang segala aspek di Lembaga pendidikan.

Ismail dalam (Sholeh, 2023) menyatakan bahwa transparansi memiliki beberapa manfaat diantaranya; transparansi dapat membangun kepercayaan diantara semua pihak. Hal ini dikarenakan dalam proses transparansi Lembaga akan menginformasikan segala

hal yang berkaitan dengan Lembaga secara terbuka dan jujur. Transparansi juga dapat membantu dalam mengambik keputusan yang informasional. Hal ini dikarenakan proses transparansi akan menyediakan data terkait Lembaga dengan akses yang lebih jelas. Tranparansi dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan warga yang ada di Lembaga. hal ini dikarenakan informasi atau data yang sudah dishare menjadi data yang diketahui bersama sehingga setiap warga memiliki dan sadar akan apa yang terjadi di Lembaga tersebut. Akhirnya transparansi akan memperkuat akuntabilitas.

Kebijakan itu sendiri terikat dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan pembiayaan pendidikan yang selama ini menjadi momok persoalan korupsi, di era society 5.0 ini bisa ditanggulangi dengan membangun sebuah system yang mendukung transparansi pengelolaan biaya pendidikan. Selain itu kerapihan data yang dapat mempermudah proses pengawasan dan evaluasi juga dapat di dukung dengan system arsip yang terintegrasi dengan teknologi, dewasa ini pengelolaan Lembaga pendidikan mengenal sebuah konsep *e-arsip*. (Endra, Rizal, & Ariani, 2016) menyatakan bahwa proses pengelolaan pendidikan yang menggunakan e-arsip akan membantu pengimplementasian Green Computing. Dengan memanfaatkan e-arsip proses penyimpanan data bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Serta pencarian arsip tertentu akan ditemukan dengan lebih mudah. Hal ini juga didukung oleh (Amalia & Panduwinata, 2022) bahwa pengelolaan arsip harus dilaukan dengan efektif dan efisien.

Sistem ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan arsip konvensional membutuhkan waktu yang lebih banyak dibanding dengan penggunaan e-arsip. E-arsip dipercaya dapat meningkatkan efektivitas penemuan kembali arsip dibanding pengelolaan arsip konvensional. Oleh karena itu, penggunaan e-arsip dalam pengelolaan pendidikan sangatlah dibutuhkan. Selain dapat meminimalisir waktu, tetapi dapat mempermudah dalam mengakses atau mengunggah arsip yang akan di bagikan atau dilaporkan ke seluruh warga di sekolah. Hal ini juga dapat membantu transparansi pengelolaan dana. Sehingga seluruh pihak dapat mengakses data tersebut lebih mudah dan terbuka.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya manusia di Lembaga pendidikan, salah satu contohnya kepala sekolah juga harus membuat kebijakan yang adil mengenai rekrutmen tenaga kerja, dimana system yang digunakan secara jelas dan terbuka.

3.2. Kepala Sekolah sebagai Pendidik

Sebagai pendidik kepala sekolah berperan dalam memastikan nilai-nilai antikorupsi hadir di Lembaga pendidikan. Mulyasa dalam (Rusdiana, 2018) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai educator berarti kepala sekolah yang mampu menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Pemimpin sekolah yang bisa memberi nasihat kepada warga sekolah, pemimpin sekolah yang bisa mendorong seluruh warga sekolah untuk menjadi lebih baik, pemimpin sekolah yang mampu membawa sekolah untuk melaksanakan model

pembelajaran yang menarik. Peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai educator diantaranya sebagai berikut; kepala sekolah membuat perencanaan, kepala sekolah sebagai fasilitator, kepala sekolah memberikan bimbingan kepada warga di sekolah, kepala sekolah mengembangkan staf dengan meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pendidik memiliki tugas untuk mengajar; membimbing guru, tenaga kependidikan dan murid; update terkait perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; serta memberikan contoh yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sebuah kesadaran Bersama tentang makna korupsi, dan bagaimana menanggulanginya. Sebagai rekan utama kepala sekolah yang menjadi ujung tombak pendidikan, guru merupakan *partner* yang memiliki misi Bersama membangun moral antikorupsi tersebut. Hal ini dapat diaplikasikan dengan membuat aktivitas/kegiatan pengenalan korupsi, juga mengimplementasikan perilaku antokorupsi dalam keseharian siswa melalui peraturan-peraturan sederhana yang di laksanakan mulai di kelas, hingga akhirnya menjadi budaya sekolah itu sendiri. (Romanti, 2023) menyatakan bahwa penanaman prinsip anti korupsi terhadap siswa dapat dilakukan dengan cara; pertama pemberian contoh yang baik oleh guru dan orang tua dalam menjalani keseharian mereka. Guru dan orang tua harus bisa menunjukkan integritas dan tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kedua adalah dengan memberi pemahaman terkait korupsi. Pemberian pemahaman ini dapat dilakukan secara formal di dalam kelas ataupun diluar kelas. Pemberian pemahaman ini dapat berupa contoh nyata dari pembelajaran sejarah atau pendidikan moral terkait dampak negatif dari perilaku korupsi itu sendiri. Ketiga dengan mendorong partisipasi murid dalam berbagai kegiatann social. Misalnya dengan mengikuti kegiatann amal, menjadi relawan dan sebagainya. Hal ini diharapkan dapat mengembangkan kesadaran bahwa kita harus saling membantu dan bersikap adil. Keempat dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi seperti game interaktif, video, atau media media online lain bisa dijadikan alternatif dalam mengajarkan nilai integritas anti korupsi. Lalu kelima adalah dengan membuat suatu program pembelajaran yang kreatif. Misal dengan membuat suatu drama mengenai prinsip-prinsip antikorupsi.

Sedangkan menurut (Anggraini, 2022) untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terkait antikorupsi selain dilaksanakan dengan adanya transparansi, sekolah juga bisa melalukan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya tindak korupsi di sekolah. Sosialisasi ini bisa berkaitan dengan pendidikan karakter yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang bebas korupsi. Hal ini bisa diwujudkan dengan beberapa hal diantaranya; mencanangkan program kantin kejujuran bagi siswa, menilai atau mengevaluasi tugas oleh siswa itu sendiri (*self evaluation*), siswa mengidentifikasi karakter jujur, sekolah mencanangkan ekstrakurikuler khusus terkait Tindakan anti korupsi, serta pemupukan

atas pemahaman bahwa kejujuran dan kedisiplinan memiliki manfaat yang luar biasa baik untuk guru ataupun murid.

3.3. Kepala Sekolah sebagai Evaluator

Peran kepemimpinan tidak terlepas dari peran pemimpin sebagai evaluator. (Rusdiana, 2018) menyatakan bahwa pemimpin harus mampu mengevaluasi proses pembelajaran oleh guru. Sedangkan dalam (Mahardhani, 2016) bahwa pemimpin sebagai evaluator berarti kepala sekolah harus menjadi penentu Langkah untuk mengukur kehadiran, kepribadian, dan kerajinan warga sekolah. Dalam hal ini berbagai perencanaan Lembaga mengenai upaya membangun ekosistem antikorupsi perlu di evaluasi sehingga pelaksanaannya dapat terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

Keadaan dunia saat ini digambarkan oleh kata VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity (Simatupang, 2020). Perencanaan jangka panjang menjadi suatu hal yang tidak mungkin dilakukan di era saat ini. Kepemimpinan dari berbagai sector harus mampu mempersiapkan era ini. Digitalisasi menjadi salah satu hal yang mutlak dilakukan dalam persiapan di era ini. Teknologi sudah terbukti dapat membantu masyarakat bertahan di era 5.0 ini. Pendapat ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam menghadapi era 5.0 sangat dibutuhkan. Era 5.0 dimana setiap hal sudah tidak pasti dan selalu tersebar di media atas hadirnya teknologi memaksa pemimpin untuk terus berkembang dalam setiap kebutuhan di dunia pendidikan khususnya. Keadaan era yang sudah ambigu dimana informasi harus dipastikan kembali kebenarannya mengharuskan pemimpin untuk terus mengupgrade informasi warga di sekolah terkait berita yang khususnya berhubungan dengan tindakan anti korupsi di dunia pendidikan.

4. SIMPULAN

Korupsi dalam pendidikan merupakan musuh Bersama yang harus diberantas. Dengan menciptakan ekosistem antikorupsi di Lembaga pendidikan diharapkan mampu membangun kesadaran Bersama warga sekolah dalam memerangi korupsi. Di era society 5.0 dimana kehidupan tidak terlepas dari perkembangan teknologi maka upaya memberantas korupsi pun harus melibatkan teknologi sebagai sebuah alat, dimana teknologi terintegrasi dalam system pengelolaan pendidikan. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan ekosistem tersebut yang pertama yakni kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan yang mendukung transparansi pengelolaan Lembaga mulai dari pembiayaan hingga pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Kedua, kepala sekolah sebagai pendidik, yang harus mampu membudayakan perilaku antikorupsi, dalam hal ini bekerjasama terutama dengan guru sebagai ujung tombak pendidikan, agar budaya antikorupsi ini juga tersampaikan kepada siswa. Ketiga, peran kepala sekolah sebagai evaluator, dimana kepala sekolah berperan untuk memastikan upaya membangun ekosistem antikorupsi di Lembaga di jalankan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLIC-KPK. (2023). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*.
- Amalia, A. T., & Panduwinata, L. F. (2022). Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (E-Arsip) Berbasis Microsoft Access Terhadap Efektivitas Penemuan Kembali Arsip Pada SMKN 4 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(3), 195–210. <https://doi.org/10.26740/jpap.v10n3.p195-210>
- Anggraini, N. F. (2022, November 11). Artikel : Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Anti Korupsi di Lingkungan Sekolah Kota Yogyakarta. Retrieved from Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga: <https://dindikpora.jogjakota.go.id/detail/index/24654>
- Anwar, I. (2019). Kisah Nabi Ilyas dalam al Qur'an: Studi Komparatif Analisa Peristiwa antara Tafsir Al Thabari dan Tafsir Al Khasin. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, P. A., R, J. S. A. A., Abbas, D. S., & Saputro, A. N. C. (2016). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.
- Binati, P. M. (2021). Pendidikan Anti-Korupsi; Sebuah Pendekatan Islami. *School Has Fallen; Runtuhnya Lembaga Pendidikan*, 4.
- dos Santos, R. A., Guevara, A. J. de H., Amorim, M. C. S., & Ferraz-Neto, B. H. (2012). Compliance and leadership: the susceptibility of leaders to the risk of corruption in organizations. *Einstein (São Paulo, Brazil)*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.1590/S1679-45082012000100003>
- Endra, R. Y., Rizal, U., & Ariani, F. (2016). E-Arsip Berbasis Image Archieve Management Process Model untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Arsip. *Explore-Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 23-32.
- Ervina, E. (2021). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: REINTERPRETASI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KONSEP AL-QAWWÂMAHDENGAN PERSPEKTIF QIRÂ'AH MUBÂDALAH. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Hallak, J., & Poisson, M. (2005). Ethics and Corruption in Education : An Overview. *Journal Of Education for International Development*, 1-16
- Hidayanto, M. F. (2005). Kepemimpinan Dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme). *Al-Mawarid*, 13, 34–43.
- Hidayat, R., & Wijaya, C. (2017). Ayat-ayat Al-qur'an Tentang Manajemen Pendidikan Islam. In *Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia*.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan. *Indonesia Corruption Watch*. <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>
- Jeremy Pope. (2008). *Strategi Memberantas Korupsi (edisi ringkas)*.

- KEMENDIKBUD, B. P. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: KEMENDIKBUD RI.
- KPK. (2021). Menguntai pendidikan antikorupsi. *Integrato*.
- Mahardhani, A. J. (2016). Kepemimpinan Ideal Kepala Sekolah. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 1–4. <https://doi.org/10.24269/dpp.v3i2.82>
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. D., & Fahmi, I. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 530–538.
- Pembudi, C. A. (2020). Artikel DJKN Pemimpin dan Kepemimpinan Kita. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: djkn.kemenkeu.go.id
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>
- PECB Beyond Recognition. (2022, Oktober 6). Diambil kembali dari sustain.id: <https://sustain.id/2022/10/06/korupsi-sektor-pendidikan-penyebab-dan-pencegahannya/>
- Rahim, A. (2019). Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pendidikan Islam. *Al Falah*, 19(1), 102–123.
- Ramadhan, A. B. (2022, oktober 08). Berita detiknews. Diambil kembali dari new.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6336399/kpk-korupsi-di-pendidikan-memprihatinkan-mulai-rekrutmen-hingga-menyontek>
- Rohman, A. (2009). Politik Ideologi Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Rokhim, A., Sarnoto, A. Z., Raya, A. T., & Bahri, S. (2022). Ekosistem Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(2), 188–216. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2611>
- Romanti. (2023, April 25). Artikel Menanam Budaya Antikorupsi pada Siswa. Retrieved from Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/menanam-budaya-antikorupsi-pada-siswa/>
- Rusdiana, E. (2018). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai Educator dalam Meningkatkan Kompetensi Guru. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 231–236. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ijemar/article/view/1829>
- Sabri, I. (2019). Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5 . 0 untuk Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2(1), 344. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302>
- Sari, E., Mulyadi, M., Yatimah, D., Maulana, R., & Solihin, D. (2021). Model Manajemen

- Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kepemimpinan Kenabian Anti-corruption Education Management Model Based on Prophetic Leadership Behavior. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 12(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2495>
- Sartika, T. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP PGRI 1 Ciputat. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43–55. <https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>
- Simatupang, A. (2020). Digitalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Dalam Pembentukan Society 5.0 dan Industri 5.0. Jakarta Timur: UKI Press.
- Solihat, E., & Sugiharto, T. (2009). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orangtua Murid Di Sma Negeri 107 Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 14(2), 135–143.
- Srimulyani, V. A. (2022). Increasing Work Engagement Through Servant Leadership and Organizational Justice. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, 3(2), 97–114. <https://doi.org/10.21831/jump.v3i2.40122>
- Sulhan, M. (2020). Hadis Manajemen Pendidikan. Bandung: YKM Production.
- Suyani. (2018). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kineja Guru Madrasah Ibtidaiyah Se-kecamatan Jabung Kabupate Lampung Timur. *Jurnal Pendidikan Agama*, 3(1), 1–130.
- Tilaar, H., & Nugroho, R. (2009). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuryati, Djailani, & Usman, N. (2015). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Masa Pandemi. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(2), 38. <https://doi.org/10.37304/eej.v5i1.7656>